

SKRIPSI

**PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM) KOTA PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SUCI AULIANI RAHMATIKA

1810113070

Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Titin Fatimah, S.H., M.H

Lerri Partra, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah proses penilaian sistematis dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja PNS. SKP meliputi unsur kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan. Perilaku Kerja terdiri dari unsur orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerja sama. Pandemi covid-19 berdampak pada perubahan seluruh tatanan dalam kehidupan, termasuk salah satunya yaitu penyelenggaraan penilaian kinerja PNS di BKPSDM Kota Padang. Perubahan ini menimbulkan adanya permasalahan dan hambatan dalam penerapan kebijakan peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti beberapa pencapaian target kerja mengalami penurunan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu berubah sehingga mempengaruhi penyelenggaraan penilaian kinerja. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masa pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* di BKPSDM Kota Padang, 2. Apa saja kendala dalam penyelenggaraan penilaian kinerja PNS pada masa pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* di BKPSDM Kota Padang dan bagaimana upaya mengatasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam kondisi pandemi penyelenggaraan penilaian kinerja PNS di BKPSDM Kota Padang kurang optimal dilakukan dan adanya kebijakan diskresi berupa perubahan sistem kerja adaptasi tatanan normal baru WFH dan WFO sesuai dengan zona resiko dan level PPKM. Pandemi ini juga berdampak terhadap beberapa kegiatan target kerja yang terjadinya penurunan penghitungan penilaian kinerja pegawai. Kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai yaitu aturan kebijakan di masa pandemi yang belum stabil, dan peralihan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PP No 46 Tahun 2011 ke PP No 30 Tahun 2019 di masa pandemi, pemotongan anggaran APBD untuk melaksanakan suatu kegiatan terbatas, sulitnya pengawasan monitoring ketika pegawai *WFH*.

Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Pegawai Negeri Sipil, Covid-19